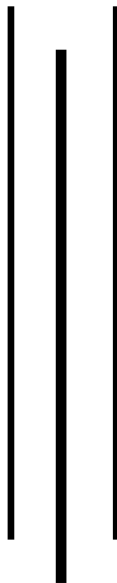




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2026**



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KATA PENGANTAR

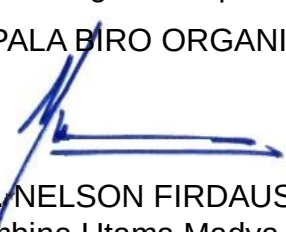
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kinerja dan peran strategis Biro Organisasi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan Renja 2026 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah khususnya Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan, serta memperhatikan dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Kami menyadari bahwa tuntutan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan semakin tinggi. Oleh karena itu, Renja ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut melalui program dan kegiatan yang terarah dan terukur.

Renja ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Biro Organisasi. Kami menempatkan Reformasi Birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan penataan kelembagaan sebagai prioritas utama. Melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, kami yakin setiap program yang dirumuskan akan memberikan dampak positif dan signifikan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi kinerja birokrasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renja ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan, serta membawa kemajuan yang berarti bagi kemajuan instansi.

Palembang, September 2025
KEPALA BIRO ORGANISASI,



Drs. NELSON FIRDAUS, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196710161988101001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisa Perangkat Daerah.....	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	7
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	8
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	10
3.1 Visi dan Misi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan.....	10
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional.....	11
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	13
3.4 Program dan Kegiatan.....	14
BAB IV PENUTUP.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan sebuah langkah strategis yang didasarkan pada komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sejalan dengan visi pembangunan yang lebih luas.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun secara langsung mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2026. Dokumen ini menjadi pedoman makro yang menetapkan arah dan prioritas pembangunan provinsi. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran RPJMD, khususnya dalam aspek reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, dan pelayanan publik. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab untuk menerjemahkan target-target RPJMD menjadi aksi nyata di tingkat operasional, memastikan bahwa struktur dan fungsi birokrasi mampu menopang seluruh agenda pembangunan daerah.

Renja ini juga diselaraskan dengan Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan yang berfokus pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan berperan sentral dalam memfasilitasi implementasi program-program ini, termasuk melalui penataan kelembagaan, penyederhanaan prosedur, dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Melalui Renja ini, Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk menjadi motor penggerak yang memastikan setiap inisiatif strategis dari pimpinan daerah dapat terlaksana secara efektif.

Sebagai bagian integral dari Sekretariat Daerah, Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 juga diselaraskan secara ketat dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah. Hal ini penting untuk memastikan adanya sinergi dan tidak terjadi tumpang tindih program antar-bagian. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan akan fokus pada peran utamanya dalam mendukung tugas dan fungsi kesekretariatan secara keseluruhan, khususnya yang berkaitan dengan penataan organisasi, tata laksana, dan manajemen kinerja. Dengan sinkronisasi ini, diharapkan setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target-target besar Sekretariat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 didasarkan pada serangkaian peraturan perundang-undangan dan kebijakan strategis yang saling terkait. Landasan hukum ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki legitimasi dan sejalan dengan kerangka kerja pemerintahan yang lebih luas.

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk tugas dan fungsi perangkat daerah seperti Biro Organisasi.
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017** tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yang memastikan adanya keterpaduan antara proses perencanaan pembangunan dengan alokasi anggaran.

4. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. **Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2026**, yang menjadi acuan utama dalam merumuskan prioritas pembangunan di tingkat provinsi. Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari sasaran-sasaran strategis yang termuat dalam RPJMD.
6. **Peraturan Gubernur Sumatera Selatan** terkait **Program Strategis Gubernur**, yang menjadi pedoman khusus dalam melaksanakan program-program prioritas pimpinan daerah, khususnya yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan.
7. **Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan**, yang menjadi panduan bagi seluruh biro di bawah Sekretariat Daerah untuk menyusun rencana kerja yang terintegrasi dan saling mendukung.

Dengan berpedoman pada landasan hukum ini, penyusunan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 tidak hanya memenuhi aspek formalitas, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan memiliki dasar hukum yang kuat dan selaras dengan arah pembangunan pemerintah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud utama dari penyusunan Renja ini adalah sebagai pedoman operasional bagi seluruh jajaran Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini menjadi acuan

tunggal yang memastikan setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang dijalankan selaras dan terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang harmonis, mencegah tumpang tindih pekerjaan, dan memastikan alokasi sumber daya yang optimal.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Menyelaraskan Peran Biro Organisasi dengan Prioritas Pembangunan Daerah, Mendukung Program Strategis Gubernur Sumatera Selatan, Mengintegrasikan Kegiatan dengan Renstra Sekretariat Daerah, Menetapkan Indikator Kinerja yang Terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Visi dan Misi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
- 3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional
- 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.4 Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun berjalan (2025) telah dievaluasi untuk mengukur sejauh mana target yang ditetapkan telah tercapai. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada capaian kuantitatif, tetapi juga menganalisis kendala dan tantangan yang dihadapi. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting untuk menyusun program kerja yang lebih efektif pada tahun 2026.

Berdasarkan laporan tingkat realisasi fisik program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun berjalan per 9 September 2025 mencapai 60%, sementara tingkat realisasi keuangan berada di angka 55,53%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang solid dalam mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan, Rincian Realisasi Program dan kegiatan Tahun 2025 Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Penyediaan Dana	Realisasi			SILPA	
			Keuangan		Fisik %	(Rp.)	%
			(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	1,203,413,200	783,366,336	65.10%	66%	420,046,864	575.08%
I.	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	20,500,000	6,994,500	34.12%	37%	13,505,500	65.88%
1	Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,500,000	6,994,500	34.12%	37%	13,505,500	65.88%
II.	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	170,000,000	122,270,000	71.92%	72%	47,730,000	28.08%
2	Sub-Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	170,000,000	122,270,000	71.92%	72%	47,730,000	28.08%
III.	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	172,173,200	90,885,317	52.79%	55%	81,287,883	227.55%
3	Sub-Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	101,373,200	75,715,397	74.69%	75%	25,657,803	25.31%
4	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	30,960,000	9,909,920	32.01%	33%	21,050,080	67.99%
5	Sub-Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	31,840,000	0	0.00%	30%	31,840,000	100.00%

No.	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Penyediaan Dana	Realisasi			SILPA	
			Keuangan		Fisik %	(Rp.)	%
			(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	8,000,000	5,260,000	65.75%	68%	2,740,000	34.25%
7	Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0.00%	0%	0	0.00%
IV.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	344,700,000	167,873,019	48.70%	50%	176,826,981	171.95%
8	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91,000,000	38,171,935	41.95%	42%	52,828,065	58.05%
9	Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226,500,000	120,787,230	53.33%	55%	105,712,770	46.67%
10	Sub-Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	27,200,000	8,913,854	32.77%	35%	18,286,146	67.23%
V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80,000,000	79,649,500	99.56%	100%	350,500	0.44%
11	Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0.00%	0%	0	0.00%
12	Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80,000,000	79,649,500	99.56%	100%	350,500	0.44%
VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237,540,000	167,414,000	70.48%	71%	70,126,000	29.52%
13	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	237,540,000	167,414,000	70.48%	71%	70,126,000	29.52%
VII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178,500,000	148,280,000	83.07%	84%	30,220,000	51.66%
14	Sub-Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	120,000,000	120,000,000	100.00%	100%	0	0.00%
15	Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58,500,000	28,280,000	48.34%	50%	30,220,000	51.66%
B.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	918,544,600	395,039,192	37.81%	40%	523,505,408	469.16%
VIII.	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	317,460,000	80,767,186	23.63%	35%	236,692,814	229.11%
16	Sub-Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	80,560,000	10,710,000	13.29%	35%	69,850,000	86.71%
17	Sub-Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	76,900,000	20,448,088	26.59%	30%	56,451,912	73.41%
18	Sub-Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	160,000,000	49,609,098	31.01%	35%	110,390,902	68.99%
IX.	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	601,084,600	314,272,006	51.99%	55%	286,812,594	240.05%
19	Sub-Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	142,070,000	73,315,088	51.60%	55%	68,754,912	48.40%
20	Sub-Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	167,019,600	108,719,670	65.09%	70%	58,299,930	34.91%
21	Sub-Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	77,860,000	47,943,400	61.58%	65%	29,916,600	38.42%
22	Sub-Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	128,135,000	42,745,665	33.36%	35%	85,389,335	66.64%
23	Sub-Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	86,000,000	41,548,183	48.31%	50%	44,451,817	51.69%
	Total	2,121,957,800	1,178,405,528	55.53%	60%	943,552,272	44.47%

2.2 Analisa Kerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 menunjukkan arah positif menuju birokrasi yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan yang telah dicapai menjadi modal penting, sementara tantangan yang dihadapi akan menjadi fokus perbaikan untuk tahun 2026. Pergeseran anggaran dan program kerja akan difokuskan untuk mengatasi kendala tersebut, memastikan Biro Organisasi tetap menjadi pilar utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 didasarkan pada analisis mendalam terhadap isu-isu krusial yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Isu-isu ini menjadi fokus utama yang harus dijawab melalui program kerja strategis.

Isu Utama dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Transformasi Digital Birokrasi. Isu paling mendesak adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan dan mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
2. Dinamika Regulasi dan Kelembagaan. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan, menuntut Biro Organisasi untuk bergerak cepat dalam melakukan penyesuaian regulasi di tingkat daerah. Proses analisis dan evaluasi kelembagaan yang berkelanjutan menjadi vital untuk memastikan struktur organisasi tetap ramping dan efektif, tanpa mengganggu kinerja pelayanan publik.
3. Penguatan Budaya Kerja Berorientasi Kinerja. Birokrasi sering kali dihadapkan pada tantangan untuk bergeser dari budaya kerja yang berfokus pada prosedur menjadi budaya yang berorientasi pada hasil (kinerja). Isu ini meliputi penataan sistem manajemen

kinerja yang lebih terukur, objektif, dan transparan, serta sosialisasi yang pasif untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya akuntabilitas dan efektivitas kerja.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). meskipun program pelatihan telah dilaksanakan, masih terdapat keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi spesifik di bidang analisis kebijakan, tata kelola digital, dan reformasi birokrasi. Isu ini diperparah dengan tingginya beban kerja, sehingga optimalisasi SDM yang ada menjadi sangat krusial.
5. Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas Sektor. Sebagai lembaga yang mengurus tata kelola, Biro Organisasi menghadapi isu koordinasi dengan perangkat daerah lain. Seringkali, terjadi tumpang tindih kewenangan atau kurangnya sinergi dalam program kerja yang seharusnya terintegrasi, seperti penataan kelembagaan atau evaluasi kinerja. Isu ini menghambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang cepat dan terarah.

Isu-isu ini akan menjadi target utama dalam Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kami akan merumuskan program dan kegiatan yang secara spesifik dirancang untuk mengatasi setiap isu tersebut, memastikan Biro Organisasi berperan aktif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 telah kami kaji secara mendalam untuk memastikan keselarasan, efektivitas, dan sinkronisasi dengan arah kebijakan nasional dan daerah. Review ini menjadi langkah krusial untuk memastikan setiap program yang diusulkan benar-benar mendukung visi, misi, dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Secara umum, Rancangan Awal RKPD 2024 menunjukkan komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan. Namun, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius seperti Sinkronisasi Program dengan Isu Strategis Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Anggaran serta Penguatan Aspek Kelembagaan dan Tata Laksana

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Visi dan Misi

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan yang telah ditetapkan. Visi dan Misi ini merupakan komitmen strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Visi

"Sumatera Selatan Terus Maju Untuk Semua."

Visi Gubernur Sumatera Selatan, **"Sumatera Selatan Terus Maju untuk Semua"**, adalah sebuah narasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Visi ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan di seluruh lapisan masyarakat dan wilayah.

Misi

Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan ada pada misi ke 6 (enam) dari 7 (tujuh) misi Gubernur Sumatera Selatan yaitu :

" Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berbasis Digital, menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas".

Pada Misi ke 6 (enam) memiliki tujuan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi serta dengan memiliki 4 (empat) sasaran yaitu

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi
4. Meningkatnya Pembangunan Hukum Daerah

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan telaahan mendalam terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Telaahan ini bertujuan untuk memastikan setiap program kerja yang disusun selaras dan mendukung agenda nasional, sehingga terjadi sinergi yang optimal antara pemerintah pusat dan daerah.

a. Keselarasan dengan Kebijakan Nasional

1. Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Kebijakan nasional menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu prioritas utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Biro Organisasi merespons kebijakan ini dengan memprioritaskan program yang berfokus pada:

- **Penyederhanaan birokrasi**
Mengurangi alur prosedur yang berbelit-belit dan melakukan penataan kelembagaan untuk menciptakan struktur yang lebih ramping dan efisien.
- **Sistem kerja berbasis digital**
Mendorong penggunaan aplikasi dan sistem informasi terpadu untuk pelayanan internal dan eksternal.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Pemerintah pusat menekankan pentingnya pengembangan kompetensi ASN yang adaptif terhadap perubahan. Menindaklanjuti hal ini, Biro Organisasi mengintegrasikan program peningkatan kapasitas SDM dalam Renja 2026. Program ini meliputi :

- Pelatihan dan sertifikasi untuk kompetensi teknis dan manajerial.
- Pengembangan sistem manajemen kinerja yang objektif dan berbasis data.

3. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Kebijakan nasional mendorong implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih terukur dan berorientasi hasil. Biro Organisasi akan mengambil peran sentral dalam memastikan seluruh perangkat daerah menyusun dan melaporkan kinerja secara akuntabel, serta memfasilitasi evaluasi SAKIP secara berkala.

b. Prioritas Pembangunan Nasional yang Relevan

Biro Organisasi juga mengkaji prioritas pembangunan nasional yang memiliki relevansi langsung dengan tugas dan fungsinya. Prioritas ini menjadi acuan dalam merumuskan program kerja:

- **Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi**

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Biro Organisasi mendukung prioritas ini dengan memastikan tata kelola kelembagaan terkait perizinan dan investasi berjalan efisien. Proses birokrasi yang cepat akan mendorong iklim investasi yang lebih kondusif.

- **Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya**

Biro Organisasi berkontribusi melalui penataan kelembagaan yang berkaitan dengan urusan sosial dan budaya, serta memastikan SDM aparatur memiliki pemahaman yang baik tentang keberagaman dan etika pelayanan.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Renja ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, lincah, dan responsif terhadap tuntutan publik serta dinamika perubahan global. Melalui serangkaian program dan kegiatan, Biro Organisasi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa struktur serta fungsi kelembagaan pemerintah berjalan optimal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Renja Biro Organisasi Tahun 2026 menetapkan sasaran strategis yang saling terkait:

1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Tata Laksana.

Sasaran ini berfokus pada penyempurnaan struktur organisasi dan proses kerja di lingkungan pemerintahan. Melalui kajian dan analisis mendalam, Biro Organisasi akan mengidentifikasi area yang membutuhkan perampingan, reorganisasi, atau penyesuaian. Tujuannya adalah untuk menghilangkan duplikasi tugas, mempercepat alur kerja, dan memastikan setiap unit kerja memiliki peran yang jelas dan relevan.

2. Penguatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan setiap instansi pemerintah bertanggung jawab penuh atas kinerja dan pencapaiannya. Biro Organisasi akan memfasilitasi penerapan sistem akuntabilitas yang lebih ketat, transparan, dan terukur. Ini termasuk penyusunan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta mendorong penggunaan indikator kinerja utama (IKU) yang lebih spesifik dan realistis.

3. Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Sasaran ini adalah inti dari upaya modernisasi birokrasi. Biro Organisasi akan berperan aktif dalam mendorong dan mengawasi implementasi program reformasi birokrasi di berbagai tingkatan. Fokus utamanya adalah pada penerapan sistem manajemen berbasis elektronik (e-government), penyederhanaan prosedur pelayanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Sasaran ini juga mencakup upaya untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan kepuasan publik.

3.4 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Tahun 2026 disusun untuk menerjemahkan sasaran strategis ke dalam aksi nyata melalui serangkaian program dan kegiatan yang terstruktur. Program-program ini dirancang untuk mencapai birokrasi yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Program kegiatan dan sub kegiatan dalam rencana kerja (Renja) Tahun 2026 Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
6. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
7. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
8. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

9. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
10. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
11. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD

V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

12. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
13. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

VI. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

VII. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.

15. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

16. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

B. Program Penataan Organisasi

VIII. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan

17. Sub Kegiatan Penataan Kelembagaan Provinsi
18. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota
19. Sub Kegiatan Analisis Jabatan

IX. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

20. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
21. Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
22. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
23. Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
24. Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik

Pagu Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja /Program/ Kegiatan/Sub- Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat. Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Ket.
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01		SEKRETARIAT DAERAH				2,099,063,400				2,212,476,000			
A.	4.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	1,180,518,800	APBD		100%	1,265,476,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik	
I.	4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	20,500,000	APBD		100%	21,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.01.01	1. Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	20,500,000	APBD		1 Dok.	21,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
II.	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	170,000,000	APBD		100%	175,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.02.02	2. Sub-Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	170,000,000	APBD		1 Dok.	175,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
III.	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	192,800,000	APBD		100%	202,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.05.01	3. Sub-Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	10,000,000	APBD		1 Dok.	11,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.05.03	4. Sub-Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	100,000,000	APBD		1 Dok.	105,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.05.04	5. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	30,960,000	APBD		1 Dok.	32,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.05.05	6. Sub-Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	31,840,000	APBD		1 Dok.	32,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	

No.	Kode Rekening	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja /Program/ Kegiatan/Sub- Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat. Penti ng	Prakiraan Maju Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Ket.
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.01.01.1.05.09	7. Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kantor Perangkat Daerah	2 Orang	10,000,000	APBD		2 Orang	11,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.05.11	8. Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kantor Perangkat Daerah	2 Orang	10,000,000	APBD		2 Orang	11,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
IV.	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	391,368,800	APBD		100%	400,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.06.04	9. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kantor Perangkat Daerah	1 Paket	91,000,000	APBD		2 Paket	93,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.06.09	10. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Perangkat Daerah	1 Laporan	250,368,800	APBD		1 Laporan	256,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.06.11	11. Sub-Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	50,000,000	APBD		1 Dok.	51,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
V.	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	177,350,000	APBD		100%	235,476,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.07.02	12. Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kantor Perangkat Daerah	1 Motor (R2)	27,350,000	APBD		3 Unit R4	80,476,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.07.10	13. Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kantor Perangkat Daerah	10 Unit	150,000,000	APBD		10 Unit	155,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
VI.	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	100,000,000	APBD		100%	101,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.08.04	14. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kantor Perangkat Daerah	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	101,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	

No.	Kode Rekening	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja /Program/ Kegiatan/Sub- Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat. Penti ng	Prakiraan Maju Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Ket.
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VII.	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	128,500,000	APBD		100%	131,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.09.08	15. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Kantor Perangkat Daerah	5 Unit	70,000,000	APBD		5 Aplikasi	71,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.01.1.09.09	16. Sub-Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kantor Perangkat Daerah	1 Unit	58,500,000	APBD		1 Unit	60,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
B.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kematangan Organisasi		7.19	918,544,600	APBD		100%	947,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik	
VIII.	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Peningkatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kantor Perangkat Daerah	100%	317,460,000	APBD		100%	324,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.02.1.01.01	17. Sub-Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	dlm daerah, luar Daerah	1 dok	80,560,000	APBD		1 dok	82,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.02.1.01.02	18. Sub-Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab./Kota	dalam daerah	1 dok	76,900,000	APBD		1 dok	78,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.02.1.01.03	19. Sub-Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Kantor Perangkat Daerah	2 dok	160,000,000	APBD		2 dok	164,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	

No.	Kode Rekening	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja /Program/ Kegiatan/Sub- Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Cat. Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Ket.
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IX.	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Peningkatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Kantor Perangkat Daerah	100%	601,084,600	APBD		100%	623,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.02.1.02.01	20. Sub-Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dalam Daerah, Luar Daerah	1 dok	142,070,000	APBD		1 dok	145,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.02.1.02.02	21. Sub-Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dalam Daerah, Luar Daerah	2 dok	167,019,600	APBD		2 dok	170,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.02.1.02.03	22. Sub-Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Budaya Kerja	Kantor Perangkat Daerah	1 Laporan	77,860,000	APBD		1 Laporan	90,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.02.1.02.04	23. Sub-Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Dalam Daerah, Luar Daerah	1 dok	128,135,000	APBD		1 dok	130,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
	4.01.02.1.02.05	24. Sub-Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dalam Daerah, Luar Daerah	1 dok	86,000,000	APBD		1 dok	88,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik	
Jumlah						2,099,063,400				2,212,476,000			

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan peta jalan yang akan memandu setiap langkah kita menuju birokrasi yang lebih modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Seluruh program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja ini, mulai dari penataan kelembagaan, penguatan akuntabilitas kinerja, hingga implementasi reformasi birokrasi, adalah upaya bersama untuk memastikan bahwa Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan positif.

Dengan semangat kolaborasi dan dedikasi tinggi, kita optimis dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renja 2026 ini adalah langkah awal yang solid untuk menciptakan birokrasi yang lincah, profesional, dan mampu menjawab setiap tantangan di masa depan, demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Palembang, September 2025

KEPALA BIRO ORGANISASI,



Drs. NELSON FIRDAUS, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196710161988101001